

IMPLEMENTASI AEC BLUEPRINT DI INDONESIA MENUJU TERWUJUDNYA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Dindin Herdiansah

Dosen Prodi Administrasi Bisnis STISIP Bina Putera Banjar

Abstrak

Untuk mencapai AEC 2015 keterlibatan semua pihak diseluruh negara anggota ASEAN mutlak diperlukan agar upaya mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas dapat memberi manfaat bagi seluruh negara ASEAN. Hal itu diwujudkan dengan berpedoman pada AEC Blueprint. Implementasi AEC Blueprint adalah kerja besar bagi ASEAN termasuk Indonesia tentunya. Tugas berat Kementerian Koordinator Bidang perekonomian sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan AEC Blueprint di Indonesia. Kementerian ini harus mengkoordinasikan sedemikian banyak kepentingan sektor yang dicakup dalam AEC Blueprint misalnya sektor perdagangan (barang dan jasa), investasi, tenaga kerja, dan sebagainya. Disamping itu elemen-elemen lain AEC Blueprint seperti kebijakan persaingan, hak kekayaan intelektual, perpajakan, usaha kecil menengah, pembangunan, infrastruktur, permodalan, e-commerce dan lain-lain juga turut dalam koordinasi dan pemantauan kementerian tersebut.

Kata Kunci : perdagangan dan AEC

Abstract

To achieve the AEC 2015, the involvement of all parties in all ASEAN member countries is absolutely necessary in order to realize ASEAN as a competitive area for investment activities and free trade can benefit all ASEAN member countries. It is realized by referring to AEC Blueprint. Implementation of AEC Blueprint is a big work for ASEAN including Indonesia of course. Heavy Duty Coordinating Ministry of Economic Affairs as the ministry responsible for coordinating and monitoring the implementation of AEC Blueprint in Indonesia. The ministry should coordinate so much of the sector interests covered by the AEC Blueprint such as trade (goods and services), investments, labor, and so on. Besides other elements of AEC Blueprint such as competition policy, intellectual property rights, taxation, small medium business, development, infrastructure, capital, e-commerce and others also participate in coordination and monitoring of the ministry

Keywords: trading and AEC

PENDAHULUAN

Keberhasilan Uni Eropa menciptakan suatu kawasan tunggal yang saling terintegrasi telah mengilhami negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan hal yang sama agar mampu bersaing dengan kawasan lainnya dalam menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Belajar dari

keberhasilan tersebut, ASEAN pun ingin mengikuti jejak keberhasilan eropa dengan mewujudkan Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015.

AEC mulai tercetus sejak tahun 1997 yang tercermin dalam Visi ASEAN 2020 yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan

pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Selanjutnya dalam Bali Concord II, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2003 selama KTT ASEAN ke-9, para pemimpin ASEAN secara resmi menyatakan keinginan mereka untuk mewujudkan *ASEAN Economic Community* (AEC). Dalam pertemuan tersebut disepakati pilar-pilar untuk menopang tujuan yang terdapat dalam Visi ASEAN 2020 yaitu *Komunitas Ekonomi ASEAN* (AEC), *Komunitas Keamanan ASEAN* (ASC) dan *Komunitas Sosial-budaya ASEAN* (ASCC). Guna mencerminkan keseriusan ASEAN untuk mewujudkan AEC tahun 2020, disepakati proses liberalisasi di wilayah ASEAN dengan tujuan mencapai integrasi pada tahun 2010 untuk 11 sektor yang diprioritaskan yaitu produk argo industri, jasa penerbangan, otomotif, E-ASEAN, elektronika, perikanan, peralatan kesehatan, produk berbahan baku karet, tekstil dan garmen, pariwisata, produk berbahan dasar kayu, dan pada tahun 2005 ditambah dengan jasa logistik. Ringkasnya, untuk tujuan mencapai integrasi ekonomi ASEAN 2020 disepakati 12 sektor prioritas yang terdiri dari 7 sektor barang dan 5 sektor jasa. Keinginan bagi tujuan mengintegrasikan perekonomian di kawasan ASEAN tampaknya semakin mantap sehingga pada KTT ASEAN Januari 2007, target tahun 2020 dipercepat menjadi tahun 2015. Tujuannya jelas, yaitu membuat ASEAN sebagai satu wilayah dimana barang, jasa, investasi, tenaga kerja yang punya keahlian dapat lalu lalang secara bebas, dan adanya aliran permodalan yang lebih bebas.

Selanjutnya para kepala negara anggota ASEAN mengeluarkan suatu Deklarasi yang mengesahkan suatu

cetak biru untuk mewujudkan aec (Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint) pada bulan Nopember 2007. ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 yang harus diterapkan oleh negara anggota menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN.

ASEAN Economic Community (AEC) *Blueprint* dilengkapi dengan Jadwal Strategik (*Strategic Schedule*) yang menjabarkan secara rinci kerangka waktu pencapaian setiap langkah-langkah yang harus diterapkan oleh negara anggota. Jadwal Strategik ini dibagi ke dalam empat tahapan: 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015. *Blueprint* ini juga akan dimonitor secara reguler setiap enam bulan dengan mempertimbangkan perubahan regional dan internasional, serta menggunakan *scorecard* untuk menilai kemajuan yang dicapai

Dari segi teknis operasional, pelaksanaan AEC Blueprint adalah kerja besar bagi anggota ASEAN termasuk Indonesia tentunya. Tugas berat bagi kementerian di Indonesia yang harus menangani dan mengkoordinasikan pelaksanaan AEC Blueprint. Kementerian ini harus mengkoordinasikan sedemikian banyak kepentingan sektor yang dicakup dalam AEC Blueprint misalnya sektor perdagangan (barang dan jasa), investasi, tenaga kerja dan sebagainya. Belum lagi elemen-elemen yang dicakup seperti Kebijakan persaingan, hak kekayaan intelektual, perpajakan, usaha kecil menengah, pembangunan infrastruktur, permodalan, e-commerce dan lain-lain.

LANDASAN TEORI

Integrasi ekonomi memiliki prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas. Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya diantara negara-negara anggota yang sepakat akan membentuk suatu integrasi ekonomi.

Menurut teori integrasi ekonomi (*economic integration*), ada enam tahapan kerja sama perdagangan untuk menuju ke integrasi ekonomi penuh, yaitu sebagai berikut:

1. Preferential Trading Area (PTA), yaitu kelompok perdagangan yang memberikan preferensi (keringanan) terhadap jenis produk tertentu kepada negara anggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif (tidak menghapuskan tarif sampai menjadi nol).

Contoh: the Europe Agreements, the European Economic Area.

2. Free Trade Area (FTA), yaitu bentuk integrasi ekonomi yang lebih tinggi dimana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif diantara negara-negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota tersebut masih berhak menentukan sendiri apakah tetap mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap negara-negara diluar anggota.

Contoh: India yang telah menandatangani kesepakatan bilateral dengan ASEAN, Sri Lanka, Thailand (kesepakatan FTA lain dengan ASEAN).

3. Custom Union, yaitu bentuk integrasi ekonomi yang mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan diantara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara luar yang bukan anggota.

Contoh: European Union, dan North American Free Trade Agreement (NAFTA).

4. Single Integrated Market (Common Market), yaitu yaitu suatu bentuk integrasi dimana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan.

Sebagai contoh, pembentukan pasar tunggal Uni Eropa yang dimulai pada tahun 1987 dengan target selesai pada 31 Desember 1992. Kebijaksanaan yang tercakup di dalam Uni Eropa antara lain, menghapus pengawasan di daerah perbatasan, persyaratan kualifikasi keahlian agar diterima dan dilaksanakan di semua pasar negara anggota, pemberlakuan standar tunggal untuk harmonisasi produk, pergerakan bebas dari modal antar negara, penghapusan subsidi untuk industri tertentu, harmonisasi pajak pertambahan nilai dan cukai di semua pasar negara anggota, dan sebagainya.

5. Economic Union and Monetary Union (kesatuan ekonomi dan moneter), yaitu bentuk integrasi ekonomi dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan.

Contohnya adalah Uni Eropa, ada pasar tunggalnya dan memakai satu kesatuan moneter (Euro).

6. Complete Economic Integration

Pada tahap ini, tidak lagi diperlukan kebijakan pengawasan ekonomi kepada unit-unit yang bergabung. Mereka telah menjadi satu kesatuan moneter dan fiskal secara penuh atau mendekati penuh. Uni Eropa adalah satu contoh yang baik mengenai integrasi ekonomi penuh.

Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi yang dapat dikatakan pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith, di mana transaksi perdagangan antarnegara dilakukan secara bebas tanpa hambatan apapun juga.

ASEAN Economic Community (AEC) adalah sebuah revolusi ekonomi ASEAN dimana menjadikan sebuah wilayah regional yang tidak memiliki batas untuk melakukan pergerakan barang dan jasa serta tenaga kerja yang didukung oleh modal baik domestik maupun asing. ASEAN Economic Community adalah pilar kedua dari ketiga pilar utama ASEAN. Pilar utama ASEAN tersebut adalah *Komunitas Keamanan ASEAN* (ASC), *Komunitas Ekonomi ASEAN* (AEC) dan *Komunitas Sosial-budaya ASEAN* (ASCC).

AEC secara resmi dinyatakan pada tanggal 7 Oktober 2003 saat KTT ASEAN ke-9 yang perwujudannya akan dilaksanakan pada tahun 2020. Namun pada KTT ASEAN Januari 2007, target tahun 2020 dipercepat menjadi tahun 2015 dan november 2007 ASEAN mengeluarkan suatu Deklarasi yang mengesahkan suatu cetak biru untuk mewujudkan AEC (*Declaration on the ASEAN Economic Community*

Blueprint) yang biasa disebut AEC Blueprint.

ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 yang harus diterapkan oleh negara anggota untuk menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN. AEC Blueprint tersebut menjadi pedoman untuk tiap negara anggota supaya mengarah pada tujuan AEC 2015, yaitu :

- a. Menuju *single market and production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal).
- b. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM).
- c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI).
- d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Perwujudan AEC ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2015. Namun mengingat adanya negara anggota yang kesiapannya masih sangat kurang maka akan diberi waktu untuk mewujudkan AEC pada tahun 2018-2020, negara tersebut yaitu: Kamboja, Laos, Myanmar dan

Vietnam. Untuk ke enam anggota ASEAN lainnya akan tetap dilaksanakan pada 2015.

ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint dilengkapi dengan Jadwal Strategik (*Strategic Schedule*) yang menjabarkan secara rinci kerangka waktu pencapaian setiap langkah-langkah yang harus diterapkan oleh negara anggota. Jadwal Strategik ini dimulai pada tahun 2008 yang dibagi ke dalam empat tahapan: 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015.

Dengan adanya AEC, maka segala bentuk PAJAK dan TARIF dihilangkan berdasarkan prioritas sektor yang disetujui, sedangkan segala faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal diijinkan bergerak bebas melewati tapal batas negara anggota ASEAN.

AEC Blueprint juga akan dimonitor secara reguler setiap enam bulan dengan mempertimbangkan perubahan regional dan internasional, serta menggunakan *scorecard* untuk menilai kemajuan yang dicapai. *Scorecard* dimaksud akan memberikan gambaran komprehensif bagaimana kemajuan ASEAN untuk mengimplementasikan AEC pada tahun 2015.

Tiap negara anggota ASEAN bertindak sebagai koordinator untuk 12 Sektor Prioritas Integrasi berikut :

1. Agro based produk oleh Myanmar.
2. Air Travel oleh Thailand.
3. Automotives oleh Indonesia.
4. e-ASEAN oleh Singapore.
5. Electronics oleh Filipina.
6. Fisheries oleh Myanmar.
7. Healthcare oleh Singapore.
8. Rubber based product oleh Malaysia.
9. Textile & Apparels oleh Malaysia.

10. Tourism oleh Thailand.
11. Wood based product oleh Indonesia.
12. Logistics oleh Vietnam.

PEMBAHASAN DAN HASIL

AEC *Blueprint* merupakan suatu *master plan* bagi ASEAN untuk membentuk komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas. Target waktu pencapaian AEC terbagi dalam empat fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015. Masing-masing negara anggota berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membentuk kredibilitas ASEAN.

Pada fase pertama pelaksanaan AEC *Blueprint* beberapa hal yang harus dipenuhi ASEAN 6, antara lain :

- Mengintegrasikan produk-produk diluar skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) sesuai dengan persetujuan CEPT.
- Menghapuskan bea impor pada 80% produk Inclusion List (IL), kecuali yang ditahapkan dari Sensitive List (SL) dan Highly Sensitive List (HSL) untuk ASEAN 6.
- Menghapuskan bea impor produk dalam Priority Integration Sector (PIS).
- Melaksanakan National Single Window (NSW) paling lambat pada 2008.

Beberapa negara anggota bertindak sebagai koordinator untuk sektor tertentu. Indonesia adalah koordinator untuk sektor otomotif dan produk berbasis kayu. Namun untuk sektor otomotif, bukan Indonesia,

Malaysia atau Thailand yang menjadi investor otomotif di ASEAN, melainkan Jepang dan AS yang mampu mengembangkan dan mengintegrasikan produk dan pemasaran produk otomotif di Asia Tenggara. Kendati demikian, pemerintah Indonesia terus mengembangkan kebijakan terpadu bagi industri otomotif untuk pasar ekspor maupun pasar dalam negeri, memperkuat struktur industri dan investasi di bidang otomotif.

Dalam hal implementasi AEC Blueprint di negara-negara ASEAN perlu adanya upaya serius dari pemerintah yang bersangkutan untuk memberikan informasi dan pemahaman yang memadai kepada setiap pihak yang berkepentingan serta diperlukan kebijakan khusus, baik pada tingkat nasional maupun regional.

Di Indonesia dalam pelaksanaan AEC Blueprint perlu menyesuaikan komitmen AEC Blueprint tersebut dengan tujuan dan agenda nasional (roadmap) serta peraturan terkait didalam negeri. Berdasarkan fungsi pengawasan DPR maka DPR mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah. Melalui TUPOKSI DPR itulah maka DPR dapat berperan dalam mendorong seefektif mungkin AEC melalui pembuatan PETA STRATEGI Indonesia agar bias mencapai hasil yang sudah ditargetkan. Jadi harus jelas, seperti apa targetnya, dan bukan sekedar hanya memantau. Termasuk akan mendiskusikan secara jelas masalah teknisnya.

Selain itu DPR akan membantu pemerintah menjalankan fungsi koordinasi dengan melibatkan 4 menteri terkait yakni :

1. Menteri Perdagangan (Mendag)
 2. Menteri Perindustrian (Menperin)
 3. Menteri Negara BUMN
 4. Menteri Negara Koperasi dan UKM
- Ditambah dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bank Indonesia serta dunia perbankan tanah air yang diharapkan secara keseluruhan dapat berperan dalam pelaksanaan AEC Blueprint. Hal ini mencakup peraturan bea cukai, standarisasi produk, perbankan, tenaga kerja, iklim investasi, telekomunikasi, transportasi dan infrastruktur lainnya dengan dukungan dari pelaku usaha yang tangguh dan visioner. Semuanya itu hanya bisa terlaksana baik bilamana ada koordinasi yang baik dan semua elemen masyarakat bisa dilibatkan.

Terdapat 5 hal yang dimuat dalam AEC Blueprint yaitu : tindakan, tujuan dalam AEC, tanggung jawab, penjadwalan serta laporan berkala. Untuk Indonesia, yang sangat berperan penting adalah dari bidang ekonomi oleh Menteri Perdagangan, dan urusan lain oleh Menteri Luar Negeri, termasuk keamanan dan sosial. Tiap negara harus melapor hasil yang dicapai setiap 6 bulan, termasuk Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar implementasi AEC Blueprint dapat dilakukan sesuai dengan kesiapan dalam negeri, mengingat implementasi akan dipantau melalui AEC Balance Scorecard dengan indikator kerja utama disetiap sektor yang diliberalisasi (barang, jasa, investasi, modal, tenaga terampil)

Untuk pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community-AEC Blueprint*) di Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan para pejabat terkait mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan komitmen cetak

biru Masyarakat Ekonomi Asean (AEC) Tahun 2011. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011.

Ditegaskan dalam Inpres tersebut bahwa dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan berpedoman kepada tiga program. **Pertama**, menuju pasar tunggal dan basis produksi, yang antara lain :

- Fokus kepada peningkatan daya saing dan pemanfaatan komitmen AEC.
- Komitmen AEC untuk arus barang secara bebas.
- Komitmen AEC untuk arus jasa secara bebas.

Kedua, menuju wilayah ekonomi yang berdaya saing tinggi, yang fokus kepada kebijakan persaingan, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan perdagangan secara elektronik.

Ketiga, menuju kawasan dengan pembangunan ekonomi yang seimbang, yang fokus kepada pengembangan sektor usaha kecil dan menengah.

Inpres yang berlaku mulai 6 Juni 2011 juga menginstruksikan para menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan BI atau dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan KPPU.

Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen AEC Blueprint tersebut merupakan kelanjutan dari Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Implementasi AEC Blueprint di Indonesia terdiri dari 4 paket Instruksi Presiden (Inpres)

diantaranya, paket Inpres No. 3 Tahun 2006, paket Inpres No. 6 Tahun 2007, paket Inpres No. 5 Tahun 2008-2009 dan paket Inpres No. 11 Tahun 2011. Selain mengacu terhadap peta panduan kebijakan tersebut, kebijakan Indonesia dalam menghadapi implementasi AEC Blueprint juga dijabarkan melalui langkah-langkah konkret diantaranya, melalui peningkatan daya saing ekonomi, reformasi kelembagaan dan pemerintah, reformasi regulasi, perbaikan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan partisipasi dan awareness seluruh elemen negara dan pelaksanaan komitmen sesuai jadwal AEC Blueprint.

Pada aspek fasilitasi Indonesia yang merupakan salah satu pioner pengembangan NSW, komit akan mengoperasikan NSW pada tahun 2008. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor Kep-05/M.EKON/02/2007 Tentang Tim Persiapan NSW. Bagi Indonesia komitmen membangun NSW merupakan keputusan yang sejalan dengan kebutuhan di dalam negeri yang sudah sangat mendesak. Sistem NSW merupakan sistem yang tepat bagi Indonesia dalam memperlancar proses pengurusan administrasi ekspor dan impor. Bukti dari tindak lanjut dari Keputusan Menteri tersebut adalah Indonesia telah memiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang secara teratur telah menerbitkan segala informasi mengenai kepabeanan. DJBC sekaligus menjadi *National Single Window (NSW)* yang bertugas melayani segala prosedur mengenai perdagangan ke luar kawasan Indonesia. Namun peraturan lain seperti kebijakan perdagangan terbaru,

peraturan transportasi dan lain-lain belum tersedia lengkap di DJBC yang seharusnya menjadi pusat informasi perdagangan ini. Sehingga, untuk mendapatkan informasi lengkap, masyarakat umum yang berkepentingan dalam sector perdagangan harus mencari di tempat yang berbeda. Kondisi ini sedang di perbaiki oleh Indonesia agar tidak memperlambat terjadinya perdagangan internasional.

Strategi lain Indonesia dalam mengintegrasikan ekonominya ke dalam AEC Blueprint adalah dengan melakukan dukungan terhadap Pasar Produk Dalam Negeri. Dukungan tersebut diantaranya adalah :

- Penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan ekonomi kreatif.
- Menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif melalui reformasi kebijakan pendukung investasi.
- Pengembangan kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus.
- Melakukan peningkatan pelayanan perizinan perdagangan bagi dunia usaha dan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari negara mitra FTA.

Sementara itu untuk melakukan penguatan daya saing global, Indonesia menetapkan UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lebih lanjut juga dilakukan perbaikan pelayanan publik (*National Single Window/NSW*), *National Infrastructure Quality*, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/ Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Upaya lainnya adalah berupa peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri dan pengembangan infrastruktur lainnya, seperti :

- Pembentukan lembaga-lembaga sertifikasi.
- Reformasi regulasi.
- Harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah.
- Penyusunan regulasi serta peta logistik dan pasar dalam negeri untuk komoditas strategis dan unggulan ekspor.

Untuk penguatan ekspor, hal yang dilakukan adalah :

- Promosi pariwisata.
- Perdagangan dan investasi.
- Program pengembangan produk dan akses pasar melalui penciptaan *brand*.
- Identifikasi potensi ekspor, dan pengembangan produk.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor serta Program pengembangan Citra.

Secara terperinci maka berikut ini dijabarkan butir-butir Pemikiran Perdagangan Indonesia yang dihasilkan pada Rapat Koordinasi Nasional KADIN 2008 dalam rangka pengembangan sektor perdagangan dan daya saing Indonesia di masa mendatang khususnya untuk tahun 2009-2014. **Pertama**, meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Peningkatan daya saing perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah dan dunia usaha, terutama dalam menghadapi peningkatan kompetisi di masa-masa mendatang. **Kedua**, keberpihakan pada kepentingan nasional. Ruang gerak bagi perusahaan nasional cenderung semakin sempit sejalan dengan peningkatan kompetisi dan semakin banyaknya pesaing global di pasar Indonesia. **Ketiga**, memperlambat laju liberalisasi perdagangan. Percepatan laju liberalisasi perdagangan pada beberapa dasawarsa terakhir telah membuat

sebagian pelaku usaha dan produk Indonesia relatif terengah-engah untuk bersaing dengan kompetitor global. Perlu diberikan kesempatan selama periode tertentu bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya menghadapi ancaman krisis ekonomi global, untuk menata diri dan meningkatkan daya saingnya. **Keempat**, meningkatkan penggunaan produk Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah serta langkah bersama dunia usaha dan masyarakat terbukti efektif untuk meningkatkan penggunaan dan kegemaran pada produk Indonesia. **Kelima**, meningkatkan promosi ekspor terpadu. Diperlukan keterpaduan promosi untuk meningkatkan ekspor Indonesia, baik dari segi penyelenggaraan maupun program. **Keenam**, meningkatkan kiprah ekspor UKM. Penyediaan fasilitas, program pelatihan dan pendanaan bagi usaha berskala kecil dan menengah perlu terus ditingkatkan, khususnya kiprah UKM dalam perdagangan internasional. **Ketujuh**, menata sistem perdagangan nasional. Perubahan peta kompetisi dan aturan main perdagangan dunia menuntut penataan menyeluruh atas sistem perdagangan Indonesia, termasuk di dalamnya menuntaskan RUU Perdagangan yang masih tertunda penyelesaiannya untuk memberi pedoman usaha perdagangan lebih jelas dan menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan bangsa. **Kedelapan**, Membangun Sinergi Peran perdagangan dalam perekonomian nasional semakin penting dan membutuhkan keterpaduan langkah dari segenap pihak terkait. Diperlukan sinergi pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong peningkatan kontribusi perdagangan dalam pembangunan nasional.

Departemen perdagangan selaku koordinator Sektor Prioritas Integrasi di Indonesia melakukan koordinasi monitoring secara berkala dengan focal point masing-masing sektor pembina seperti dengan Departemen Pertanian (Agriculture), Departemen Perindustrian (Elektronik, Rubber Based, Textile and Apparels), Departemen Perhubungan (Air Travel), Departemen Kesehatan & BPOM (Healthcare), Departemen Kelautan dan Perikanan (Fisheries), Departemen Kominfo (e-ASEAN), Departemen Kebudayaan & Pariwisata (Tourism) dan Menko Perekonomian (Logistik) dimana secara departemental, kegiatan logistik nasional saat ini berada dibawah koordinasi Departemen Perdagangan (aspek pergudangan dan perdagangan), Departemen Perhubungan (Transportasi), Departemen Keuangan (Kepabeanaan, Asuransi dan Perbankan), Departemen Komunikasi dan Info (Telekomunikasi, Perposan, kurir), Kementrian Negara BUMN (pengaturan BUMN bidang pengelola infrastruktur logistik dan penyedia jasa logistik), bahkan termasuk BKPM (dalam hal pendirian perusahaan dan penanaman modal).

Sesuai dengan Scorecard, Indonesia merupakan negara anggota ASEAN yang cukup baik menjalankan agenda yang sesuai dengan AEC Blueprint, sesuai dengan laporan pada pertemuan tingkat menteri di Vietnam tahun 2009 Indonesia telah siap menghadapi AEC 2015.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengatakan tingkat implementasi Indonesia terhadap cetak biru AEC sampai 31 Oktober 2011 telah mencapai 80,74%. Pengimplementasian AEC Blueprint pun sudah mengalami kemajuan yang signifikan, yaitu pilar

menuju pasar tunggal dan basis produksi. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Indonesia, saat ini tarif bea masuk di antara negara-negara ASEAN 99 % sudah berada dalam posisi nol. Berdasarkan ATIGA, disepakati 54.467 pos tarif dinolkan bea masuknya atau 99,65% dari pos tarif barang yang diperdagangkan dalam AFTA untuk ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam). Termasuk di dalamnya makanan olahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

AEC adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan baris produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Adanya aliran komoditi dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN.

Untuk mencapai AEC 2015 keterlibatan semua pihak diseluruh negara anggota ASEAN mutlak diperlukan agar upaya mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas dapat memberi manfaat bagi seluruh negara ASEAN. Hal itu diwujudkan dengan berpedoman pada AEC Blueprint.

Implementasi AEC Blueprint adalah kerja besar bagi ASEAN termasuk Indonesia tentunya. Tugas berat Kementerian Koordinator Bidang

perekonomian sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan AEC Blueprint di Indonesia. Kementerian ini harus mengkoordinasikan sedemikian banyak kepentingan sektor yang dicakup dalam AEC Blueprint misalnya sektor perdagangan (barang dan jasa), investasi, tenaga kerja, dan sebagainya. Disamping itu elemen-elemen lain AEC Blueprint seperti kebijakan persaingan, hak kekayaan intelektual, perpajakan, usaha kecil menengah, pembangunan, infrastruktur, permodalan,, e-commerce dan lain-lain juga turut dalam koordinasi dan pemantauan kementerian tersebut.

Untuk pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community-AEC Blueprint*) di Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan para pejabat terkait mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan komitmen cetak biru Masyarakat Ekonomi Asean (AEC) Tahun 2011. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011.

Implementasi AEC Blueprint di Indonesia terdiri dari 4 paket Instruksi Presiden (Inpres) diantaranya, paket Inpres No. 3 Tahun 2006, paket Inpres No. 6 Tahun 2007, paket Inpres No. 5 Tahun 2008-2009 dan paket Inpres No. 11 Tahun 2011. Selain mengacu terhadap peta panduan kebijakan tersebut, kebijakan Indonesia dalam menghadapi implementasi AEC Blueprint juga dijabarkan melalui langkah-langkah konkret diantaranya, melalui peningkatan daya saing ekonomi, reformasi kelembagaan dan pemerintah, reformasi regulasi, perbaikan infrastruktur,

pemberdayaan UMKM, penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan partisipasi dan awareness seluruh elemen negara dan pelaksanaan komitmen sesuai jadwal AEC Blueprint. Inpres tersebut seyogyanya akan diperbaharui mengikuti jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam AEC Blueprint.

Sesuai dengan Scorecard, Indonesia merupakan negara anggota ASEAN yang cukup baik menjalankan agenda yang sesuai dengan AEC Blueprint, sesuai dengan laporan pada pertemuan tingkat menteri di Vietnam tahun 2009 Indonesia telah siap menghadapi AEC 2015. Dengan terbentuknya AEC pada tahun 2015 tentunya diharapkan terdapat peningkatan-peningkatan kesejahteraan kawasan yang lebih baik terutama pada tiga pilar ASEAN, yaitu: keamanan, ekonomi dan sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. *Integrasi Ekonomi* (Online), (<http://zetzu.blogspot.com/2010/10/integrasi-ekonomi.html>, diakses 14 juli 2012).
- Anonim. 2011. *Economic Community 'Perdagangan Bebas ASEAN'* (Online), (<http://menikmatidemokrasi.wordpress.com/2011/01/27/economic-community-perdagangan-bebas-asean/>, 14 juli 2012).
- Anonim. 2011. *Inpres tentang Pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Asean 2011* (Online), (<http://mindcommonline.com/ekonomi/inpres-tentang-pelaksanaan-cetak-biru-masyarakat-ekonomi-asean-2011/>, diakses 17 juli 2012).
- Anonim. 2012. *ASEAN Merupakan Gerbang Menuju Ekonomi Global*, (Online), (<http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/165-diplomasi-juni-2012/1442-asean-merupakan-gerbang-menuju-ekonomi-global.html>, 14 Juli 2012).
- BNSP. 2011. *Sosialisasi Inpres No. 11 Tahun 2011 Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN AEC (Asean Economic Community) dan Hasil-Hasil KTT ASEAN Ke-18*" (pdf), (http://202.169.37.68/website_bnsps/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=3845%3Akat-9-mancanegara&Itemid=157&lang=en, diakses 17 juli 2012).
- Depdag. 2010. *Menuju AEC 2015* (pdf), (<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Ummum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf>, diakses 14 juli 2012).
- Soetanto, Herry. 2008. *ASEAN Economic Community (AEC) 2015....Ayo kita siap-siap!!!* (Online), (<http://soetanto.wordpress.com/asean-economic-community-aec-2015ayo-kita-siap-siap/>, diakses 14 juli 2012).

